



**PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KAWASAN MANGROVE
DI KELURAHAN KLAMANA DAN KLAWALU DISTRIK SORONG
TIMUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Universitas Victory Sorong

Roni Urosa¹, Yetti S. Serkadifat², Lanny Wattimena³

Email: roniurosa@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di kawasan mangrove Kelurahan Klamana dan Klawalu, Distrik Sorong Timur. Pemerintah Kota Sorong berperan penting menjaga mangrove karena fungsi ekologis dan ekonomisnya yang signifikan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. PERDA No 1/2023 menetapkan target minimal 70% luas mangrove tetap terjaga. Kegiatan meliputi rehabilitasi, pemberdayaan, penanaman, pembibitan dan pendampingan ekonomi masyarakat. Metode yang dipakai: Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* responden utama diantaranya PLT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Kota Sorong (KPHL) Bapak Yohanes Putrirulan, SP.M.Si Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong (DPPLH) Bapak Trinalk E Sitorus, SE, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sorong Bapak Ruben Jitmau.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; menjaga kawasan mangrove

ABSTRACT

Research was conducted in the mangrove areas of Klamana and Klawalu villages, Sorong Timur District. Sorong City government plays a crucial role in protecting mangroves because of their significant ecological and economic functions and their support for sustainable development. PERDA No 1/2023 sets a target of maintaining at least 70% of mangrove area. Activities include rehabilitation, community empowerment, planting, seedling production and economic assistance for locals. Respondents were selected using purposive sampling, mainly PLT of the Protected Forest Management Unit II, Mr. Yohanes Putrirulan, SP., (link unavailable); Head of Environmental Damage Section, Mr. Trinalk E. Sitorus, SE; and Tourism Office Secretary, Mr. Ruben Jitmau.

Keywords: Government Role; protecting mangrove areas



1. PENDAHULUAN

Tumbuhan mangrove dengan keanekaragaman yang tinggi dan ukuran luasan terbesar di dunia. Kondisi ini dimungkinkan karena geografis, sejarah geologi dan topologi kepulauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam laporan Peta Mangrove Nasional tahun 2024, serta ciri oseanografi khas yang dimiliki Indonesia. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peranan sangat penting, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Ekosistem ini mampu menjadi benteng alami terhadap abrasi pantai, menyerap karbon dioksida menjaga kualitas air, serta menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Peranannya sangat vital terutama masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, termasuk di wilayah timur seperti Provinsi Papua Barat Daya, keberadaan mangrove masih cukup luas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, namun terus mengalami tekanan akibat aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, pembangunan permukiman serta pengembangan liar. Salah satu kawasan yang memiliki hutan mangrove yang cukup luas. Kelurahan Klamana, Distrik Sorong, kota Sorong. Kawasan ini memiliki garis pantai dengan kawasan mangrove yang relatif terjaga, namun kini mulai menghadapi tantangan urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat, dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem mangrove peran maka pemerintah berperan dalam menjaga kawasan mangrove dengan melakukan kegiatan kegiatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjaga kawasan mangrove.

2. KAJIAN TEORI

Kajian terbaru mangrove Kota Sorong Kondisi ekosistem yang terus menurun karena penebangan kayu, konversi lahan dan abrasi data lapangan



dari studi universitas hasanuddin (2024) penurunan luas mangrove di klawalu dan sekitar dengan indeks nilai penting (INP) yang masih bervariasi antara 20% - 190% tergantung spesies,

Persepsi dan partisipasi masyarakat di Distrik Sorong Timur, dimana 63% responden mengakui pentingnya mangrove, menandakan masih rendahnya kesadaran kolektif, data lapangan dari studi universitas hasanuddin (2024). Kebaruan yang muncul yaitu

Studi “Harmoni Mangrove” Wanamina sebagai infasi keseimbangan ekosistem di Kota Sorong (2024) menilai kesesuaian lahan untuk wanamina di Distrik Sorong Timur, menyoroti pentingnya integrasi masyarakat lokal dalam pengelolaan.

Hasan et.al.(2024) produktifitas ekowisata mangrove Klawalu, menyoroti kebutuhan integrasi masyarakat dan stakeholder untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus konservasi.

3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* atau teknik pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Yaitu orang yang dijadikan responden adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan kawasan mangrove masing - masing 1 (satu) orang dari 3 (tiga) instansi yaitu Dinas Pariwisata, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung unit 2 Kota Sorong, dan DPPLH Kota Sorong . Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. diantaranya PLT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Kota Sorong (KPHL) Bapak Yohanes Putrirulan,SP.M.Si Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong (DPPLH) Bapak Trinalk E Sitorus, SE, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sorong Bapak Ruben Jitmau.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, peran pemerintah sangat mempengaruhi keberlanjutan kawasan mangrove di Kelurahan Klamana dan Klawalu adapun kegiatan yang suda dilakukan yaitu Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan Penetapan kawasan ekosistem esensial ditujukan untuk tetap mempertahankan minimal 70% luas ekosistem mangrove di Provinsi Papua Barat Daya, PERDA No 1 (2023) tentang rencana tata ruang wilayah Sorong. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan antara lain :

Kegiatan Rehabilitasi, Pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan penanaman pohon dan juga penanaman 20.000 bibit pohon pohon bakau oleh DPPLH Kota Sorong.



Gambar : 1 pengangkutan bibit dari KTH

Kegiatan Perlindungan, perindungan ekosistem mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan hutan mangrove, mempertahankan keberadaan mangrove dengan kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman dan pembersihan sekitar kawasan mangrove



Gambar 2 : kegiatan penanaman dan pembersiha

Peran pemerintah dalam menjaga kawasan mangrove melalui berbagai upaya, seperti restorasi ekosistem melalui program penanaman dan rehabilitasi, penguatan regulasi dan kebijakan untuk konservasi hutan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mangrove,

pemerdayaan masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, dan pengelolaan wisata mangrove secara berkelanjutan

Pendekatan kepada masyarakat, dengan melakukan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat adat dan masyarakat sekitar kawasan mangrove terkait pentingnya menjaga kawasan mangrove, membentuk kelompok tani pembibitan jenis - jenis mangrove dan juga pembimbingan membuat tepung dan sirup dari jenis mangrove *Bruguiera gymnorhiza* dan *sonneratia caseolaris*



Gambar 2: Sosialisasi

5. Kesimpulan

Penetapan kawasan ekosistem esensial ditujukan untuk tetap mempertahankan minimal 70 % luas ekosistem mangrove di Provinsi Papua Barat daya. Ekosistem mangrove yang berada di kawasan yang telah diberikan perijinan pengelolaan, dapat di tetapkan sebagai kawasan esensial terutama pada kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, tempat keramat masyarakat adat, daerah perlindungan dan tempat daerah perlindungan dan tempat mencari sumber kehidupan masyarakat lokal PERDA No 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Runag Wilayah Kota Sorong.

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kawasan mangrove yaitu rehabilitasi, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman, pembibitan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan pendampingan dalam pemanfaatan tumbuhan mangrove.

Saran

Diharapkan adanya perda yang mengatur larangan dalam pemanfaatan kayu mangrove dan batu karang dari dalam kawasan mangrove.



6. DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024. luas mangrove di provinsi Papua Barat Daya sekitar.

Mudjab, S. 2017 . *Persepsi Masyarakat Dalam Restorasi Hutan mangrove (Studi Deskriptif Kualitatif Program Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Tani Sidodadi Maju (KTSM) Desa Baggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)*. Program Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universita Muhamadiyah Surakarta. Skripsi.

PERDA No 1,2023. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong.

Saputra E. M 2015. *Persepsi Masyarakat terhadap manfaat lingkungan Objeek wisata Sungai Koruba Di Kawasan Tahura Nipa-Nipa Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga kota kendari*. Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Skripsi.

Sondakh V. S., Siti Suhaeni, Lumeta V. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Alkutusasi Volume 7 Nomor 1 (April 2019) ISSN.2337-4195/e-ISSN: 2685-4759*

Taabalessy R.R. 2014. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat*. Universitas Sam Ratulangi Program Pascasarjana.

universitas Hasanuddin 2024. Data lapangan dari studi universitas, Kondisi ekosistem yang terus menurun karena penebangan kayu, konversi lahan dan abrasi data lapangan dari studi